



SIBULUE BANGKIT

Jl. Poros Pattiro Bajo

kecamatanansibuluebonesulsel@gmail.com

kecamatan.bone.go.id

92781



TERIMAKASIH
KEPADA SELURUH TIM
WORK SAKIP & R
KECAMATAN SIBULUE

Semoga Menjadi
Amal Ibadah Untuk
Kita Semua



M. PADJALANGI, M.Si

ANDI ZAINAL WAHYUDI, S.E., M.Si

CAMAT SIBULUE

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) KECAMATAN SIBULUE TAHUN 2022



KATAPENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat tuhan yang maha kuasa atas rahmat dan karunianya, kami dapat menyelesaikan penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP) Kecamatan SibuluE Tahun 2022. LKjIP Kecamatan SibuluE Tahun 2022 merupakan bentuk komitmen nyata d Kecamatan SibuluE dalam mengimplementasikan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (sakip) sebagai mana diamanatkan dalam PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang laporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan secara teknis diatur Dalam Peraturan Menteri Pan dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara review atas laporan kinerja instansi pemerintah. LKjIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Kinerja Kecamatan SibuluE telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKjIP Kecamatan SibuluE. Tujuan penyusunan LKjIP adalah untuk menggambarkan penerapan rencana strategis (renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. melalui penyusunan LKjIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip good governance, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah. secara keseluruhan, penyelenggaraan program dan kegiatan Kecamatan SibuluE telah banyak membuahkan hasil pembangunan. Capaian kedua indikator kinerja utama Kecamatan SibuluE telah memenuhi kriteria sangat baik. Hasil kinerja tersebut tentunya tidak terlepas dari orientasi atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan secara terpadu, fokus dan berkelanjutan. Meskipun semua indikator sudah tercapai, namun masih ada beberapa kekurangan yang perlu dilakukan perbaikan demi mendukung terwujudnya good governance. demikian LKjIP ini kami susun semoga bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja sektor Kecamatan SibuluE di masa mendatang.



Mareang, 20 Januari 2023

K A M A T,

ANDI ZAINAL WAHYUDI, SE, M.Si

Pangkat : Pembina

Nip : 19740304 200701 1 021

BAB I PENDAHULUAN

A. UMUM



B. ORGANISASI



C. ISU STRATEGIS



D. ASPEK STRATEGIS



A. UMUM

Penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah merupakan amanat dari peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah dan peraturan menteri pemberdayaan aparatur negara, laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara/anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbn/apbd) dan reformasi birokrasi republik indonesia nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara review atas laporan kinerja instansi pemerintah.

Mengacu kepada peraturan menteri pemberdayaan aparatur negara dan reformasi birokrasi republik indonesia nomor 53 tahun 2014, lkip tingkat pemerintahan kota disampaikan kepada presiden melalui menteri pemberdayaan aparatur negara dan reformasi birokrasi selambat lambatnya dua bulan setelah tahun anggaran berakhir. laporan kinerja instansi pemerintah bertujuan memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dicapai dan sebagai

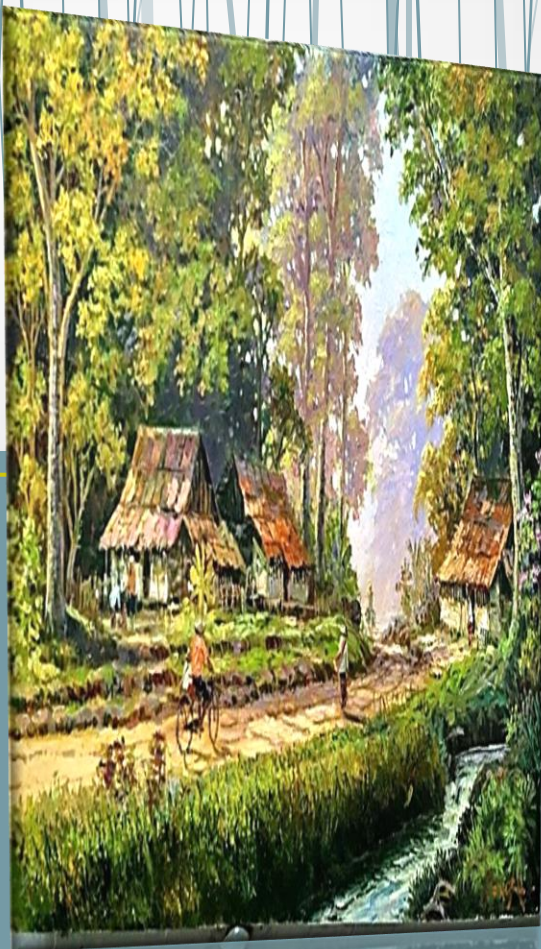
upaya pemerintah meningkatkan kinerjanya, dampak yang diharapkan adalah terwujudnya *clean government* dan *good governance* pada kecamatan sibulue kabupaten bone.

Penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi salah satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan Perpres Nomor : 29 Tahun 2014 tentang Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.



B. ORGANISASI

Kecamatan SibuluE merupakan salah satu dari 27 Kecamatan di Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan dengan Luas Wilayah 156 Km² dengan Jumlah Penduduk 36,373 Jiwa dan Jumlah KK. 8.607 dengan jarak 14 km dari Kota Kabupaten Bone. Kecamatan SibuluE termasuk wilayah yang beriklim sedang dengan temperatur udara rata-rata berkisar 23°C-30°C. Kecamatan SibuluE terdiri dari 20 (Dua Puluh) Desa, 2 (Dua) UPT Kesehatan yang berada di Kelurahan Maroanging dan Desa Tunreng TelluE, 1 UPT Pendidikan, 1 UPT KB & KS dan 1 BPP.



Secara Geografis Kecamatan SibuluE terletak pada sebelah Selatan Kabupaten Bone dengan batas-batas sebagai berikut :

**Kecamatan
Barebbo**

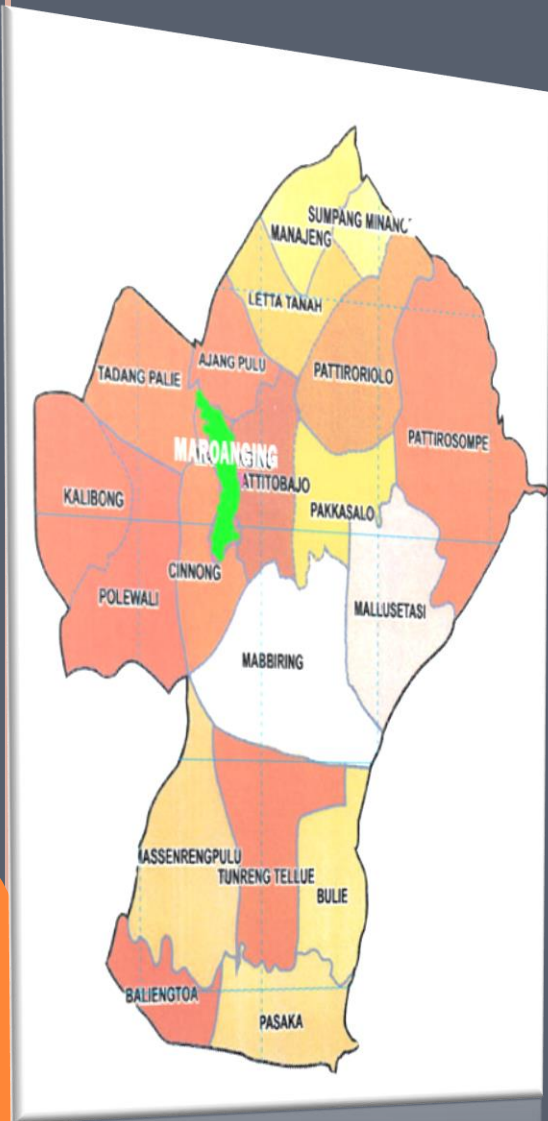


**Kecamatan
Mare**

**T
e
l
u
k**

**K
e
c
a
m
a
t
a
n**

Kecamatan SibuluE memiliki 1 Kelurahan dan 19 Desa dengan ketinggian diatas permukaan laut 454 M yaitu :



- ← Kelurahan Maroanging
- ← Desa Pattiro Bajo
- ← Desa Pakkasalo
- ← Desa Malluse Tasi
- ← Desa Pattiro Sompe
- ← Desa Mabbiring
- ← Desa BuliE
- ← Desa Pasaka
- ← Desa Tunreng TelluE
- ← Desa Massenreng Pulu
- ← Desa Balieng Tao
- ← Desa Kalibpng



Kecamatan SibuluE memiliki luas tanah sawah 3653 Ha, dan tanah kering 8875 Ha, lahan tersebut didominasi untuk kegiatan pertanian, perkebunan dan peternakan, sedangkan dari sektor ekonomi Kecamatan SibuluE memiliki 2 pasar yang digunakan sebagai sarana dalam perekonomian masyarakat, kedua pasar tersebut merupakan pasar tradisional.

Salah satu aspek terpenting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah dibukanya peluang bagi masyarakat untuk turut serta dalam pengambilan keputusan pembangunan, termasuk aspek perencanaan. Ruang yang disiapkan bagi keikutsertaan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan adalah Musrenbang yang dilaksanakan secara berjenjang yang dimulai dari tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota sampai tingkat Nasional.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8 dan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan SibuluE diatur dalam Peraturan Bupati Bone Nomor : 96 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.



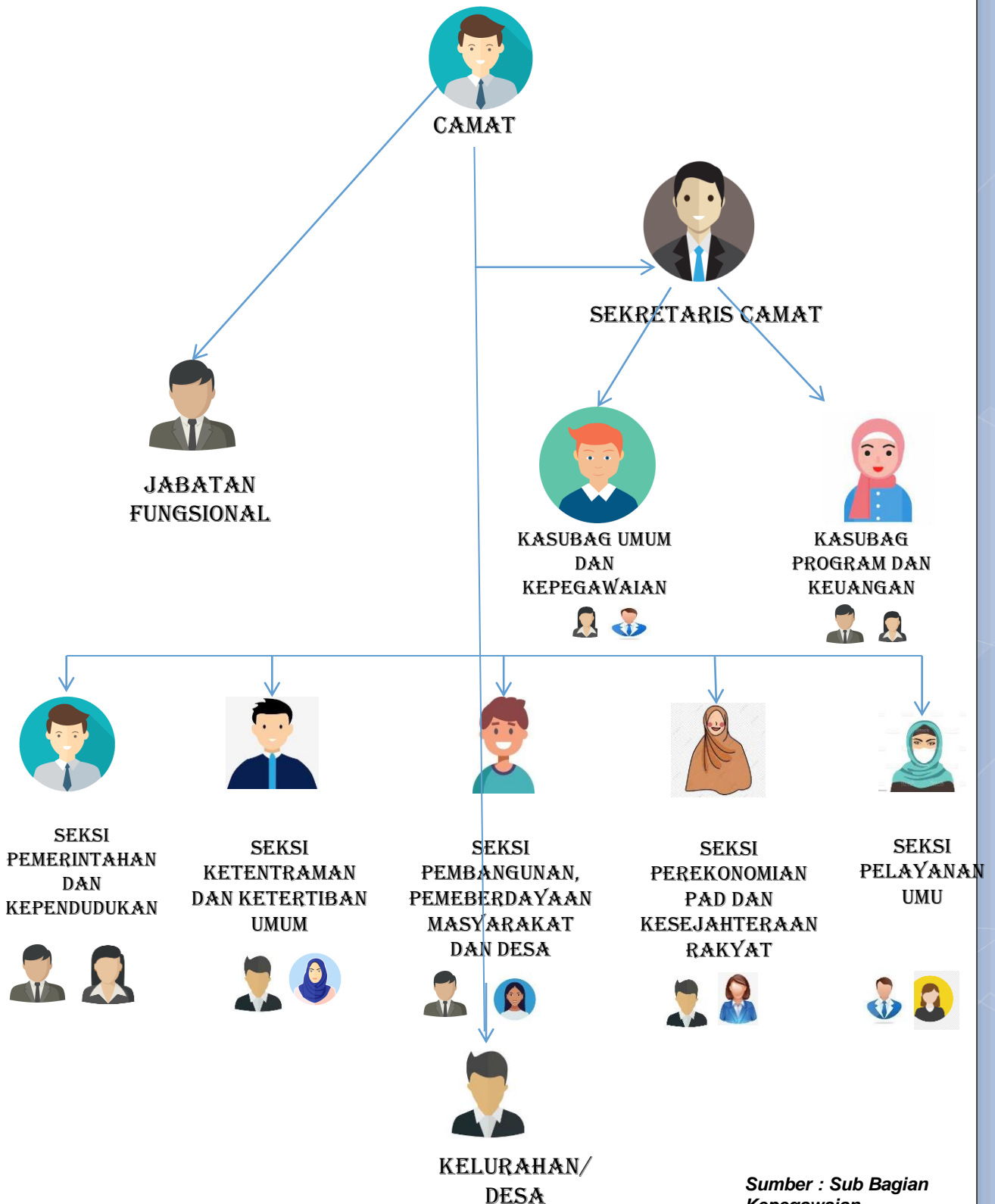
Tugas Pokok Kecamatan Sibulue yang dipimpin oleh Camat adalah membantu Bupati melaksanakan pemerintahan di wilayah Kecamatan dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud, Kecamatan mempunyai fungsi :

Tugas Pokok Kecamatan

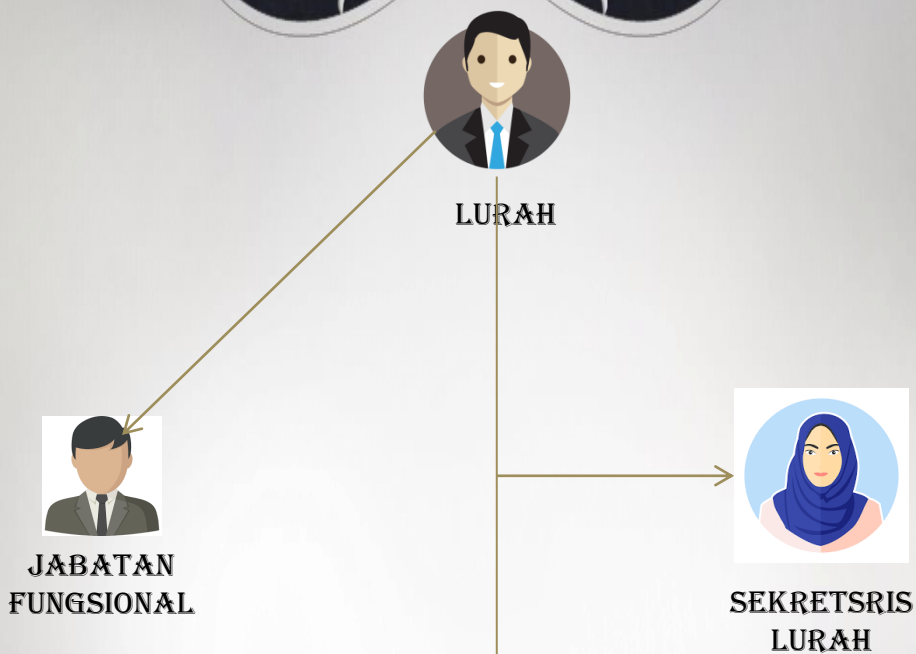
- Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- Pengordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- Pengordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- Pengordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- Pengordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
- Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di Kecamatan; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

STRUKTUR
ORGANISASI
KECAMATAN SIBULUE

Tambahkan 1.1 dan
sumber data sesuai
perbup



Sumber : Sub Bagian
Kepegawaian
Kecamatan Sibulue 2022



**STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR KELURAHAN
MAROANGING**

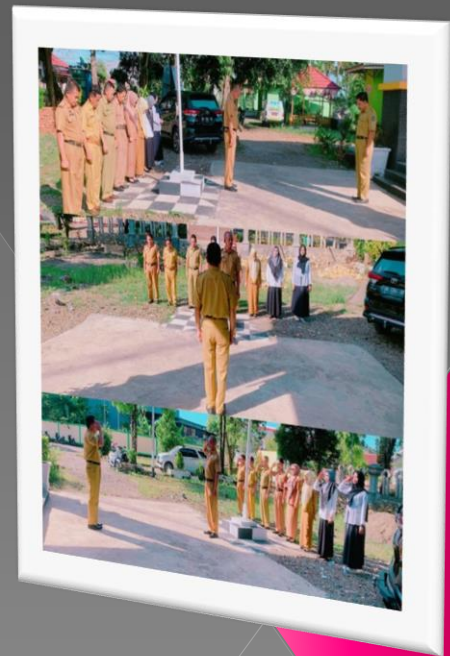
SUMBER DAYA KECAMATAN SIBULUE

Dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Kecamatan SibuluE mempunyai 15 orang PNS dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.1 Susunan Pegawai Kecamatan SibuluE

N O	SUSUNAN KEPEGAWAIAN	JUMLAH PERSONIL
1	2	3
1	CAMAT	1
2	SEKERTARIS CAMAT	1
3	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	1
	- Pengadministrasi Umum	-
	- Pengadministrasi Kepegawaian	-
	- Analis Data dan Informasi	-
	- Pramu Bakti	-
4	SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN	1
	- Pengelola Gaji	-
	- Bendahara	1
	- Pengadministrasi Perencanaan dan Program	-

5	KASI PEMERINTAHAN DAN KEPENDUDUKAN	1
	- Pengadministrasi Kependudukan	-
	- Pengadministrasi Pemerintahan	-
	- Analis Pemerintah Umum dan Otonomi Daerah	-
6	KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1
	- Analis Keamanan	1
	- Pengadministrasi Umum	-
	- Analisis Desa dan Kelurahan	-
7	KASI PEMBANGUNAN, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT & DESA	1
	- Analis Pemberdayaan Masyarakat	1
	- Pengadministrasi Umum	-
8	KASI PEREKONOMIAN, PAD DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	1
	- Pengadministrasi Umum	-
	- Analis Perekonomian	-
9	KASI PELAYANAN UMUM	-
	- Pengadministrasi Umum	-
	- Analis Pelayanan	-
JUMLAH		11



Sumber : Sub Bagian Kepegawaian Kecamatan SibuluE 2022

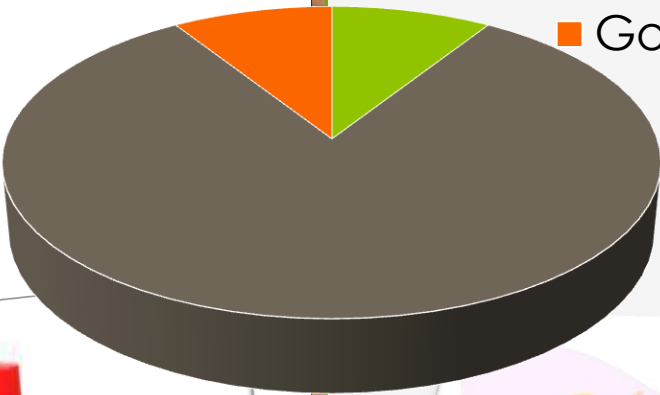
Tabel. 1.2 Komposisi SDM Organisasi

KOMPOSISI SDM ORGANISASI UNIT KERJA KECAMATAN SIBULUE								
NO	JENIS PENDIDIKAN	JML	NO	GOL.	JML	NO	JABATAN	JML
1	SD	-	1	I	-	1	STRUKTURAL	11
2	SMP	-	2	II	1	2	FUNGSIONAL	-
3	SMA	-	3	II	-			
4	DIPLOMA 1	-	4	III	8			
5	DIPLOMA 2	-	5	IV	1			
6	DIPLOMA 3	-						
7	STRATA 1	9						
8	STRATA 2	2						
JUMLAH		11	JUMLAH		11	JUMLAH		11

Sumber : Sub Bagian Kepegawaian Kecamatan SibuluE keadaan Bulan Desember 2022

SDM Berdasarkan Golongan

- Gol IV
- Gol III
- Gol II





Isu Strategis, adalah merupakan suatu permasalahan yang sedang hangat dibicarakan orang yang mempunyai nilai kelayakan, strategis dan mendesak untuk dicarikan jalan keluarnya serta memerlukan analisis terhadap berbagai dimensi yang berpengaruh (dipengaruhi dan mempengaruhi) untuk itu perlu dicarikan alternative pemecahannya. Adapun isu strategis yang dihadapi Kecamatan Sibulue adalah sebagai berikut :

- Reformasi Birokrasi, SDM aparatur yang tersedia di Kecamatan SibuluE sebagai unit pelayanan kepada masyarakat masih dirasakan kurang, baik secara kualitas dalam menguasai bidang tugas maupun secara kuantitas sehingga belum dapat berjalan maksimal seiring dengan perkembangan tuntutan masyarakat.
- Keterbatasan sarana dan prasarana, baik kualitas maupun kuantitas sehingga mempengaruhi gairah serta produktivitas aparatur.
- Keterbatasan jangkauan serta kapasitas pembinaan yang disebabkan keterbatasan anggaran serta kewenangan.
- Tingkat partisipasi dan kepedulian sosial pihak swasta/stakeholders yang masih rendah.
- Tata kelola Pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN.
- Sustainable Development Goals (SDG's) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan merupakan 17 tujuan dengan 169 capaian yang terukur dan tenggat yang telah ditentukan oleh PBB sebagai agenda dunia pembangunan untuk kemaslahatan manusia dan planet bumi, Tujuan ini dicanangkan bersama oleh negara-negara lintas pemerintahan pada resolusi PBB yang diterbitkan pada 21 Oktober 2015 sebagai ambisi pembangunan bersama hingga Tahun 2030 yang ditandatangani oleh pemimpin- pemimpin dari 189 negara sebagai Deklarasi Milenium di markas besar PBB pada tahun 2000 dan tidak berlaku lagi sejak akhir 2015.



g. Pandemi COVID-19 di Indonesia merupakan bagian dari pandemi penyakit coronavirus 2019 (COVID-19) yang dialami oleh seluruh dunia. Penyakit ini disebabkan oleh sindrom pernapasan akut parah coronavirus 2 (SARS-CoV-2). Pandemi corona virus (Covid-19) menimbulkan setidaknya tiga dampak terhadap perekonomian Indonesia, yaitu penurunan pertumbuhan ekonomi, peningkatan pengangguran, dan peningkatan kemiskinan 19 menyebar ke Indonesia, hampir seluruh sektor menerima dampak negatifnya, tidak hanya sosial, kesehatan dan pendidikan, tetapi sektor ekonomi juga mengalami dampak serius akibat pandemi virus corona ini. Pembatasan aktivitas masyarakat, berpengaruh pada aktivitas bisnis yang kemudian berimbas pada perekonomian.

h. Penanggulangan Pencegahan Stunting di wilayah Indonesia sudah berbagai program dan upaya yang dikeluarkan oleh unsur pemerintah bekerjasama dengan pihak kesehatan agar pencegahan Stunting di Indonesia berkurang demi upaya menciptakan anak bangsa yang sehat.



D. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Dalam upaya usaha peningkatan kinerja Kecamatan SibuluE Kabupaten Bone maka dilaksanakan beberapa strategi antara lain :



1. Penyediaan dan Pengembangan Infrastruktur, khususnya yang terkait penyediaan pelayanan dasar seperti sarana dan prasarana belajar, fasilitas kesehatan, sanitasi layak, air bersih, pengelolaan persampahan.
2. Peningkatan jangkauan serta kapasitas pembinaan kepada masyarakat
3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
4. Peningkatan partisipasi dan kepedulian sosial pihak swasta/stakeholders yang ada di lingkungan Kecamatan SibuluE.
5. Penyediaan sarana dan prasarana, baik kualitas maupun kuantitas sehingga meningkatkan produktivitas aparatur.



BAB II PERENCANAAN KINERJA

- A. TUJUAN DAN SASARAN**
- B. STRATEGI DAN ARAH
KEBIJAKAN**

- C. INDIKATOR KINERJA UTAMA**
- D. PERJANJIAN KINERJA**
- E. STANDAR PENILAIAN KINERJA**

A. TUJUAN DAN SASARAN

Rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah kecamatan merupakan pernyataan yang menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD Kabupaten Bone 2018-2023 yang disertai dengan indikator kinerja. Tujuan Rencana Strategis merupakan implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 3 (Tiga) tahun. Dengan ditetapkannya Tujuan Perubahan Rencana Strategis Kecamatan SibuluE, maka Kecamatan SibuluE dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam mewujudkan misi pembangunan daerah dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.



Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Renstra 2018-2023

Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Pada Tahun ke-				
		2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Hasil Evaluasi Sakip oleh Apip	60.15 Peringkat B	60.20 Peringkat B	60.30 Peringkat B	70.20 Peringkat BB	80.01 Peringkat A
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standard Pelayanan	70	75	80	90	95

Sumber Data : Dokumen Perubahan Rencana Strategis T.A 2018-2023 Kecamatan SibuluE

B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

STRATEGIS

ARAH KEBIJAKAN

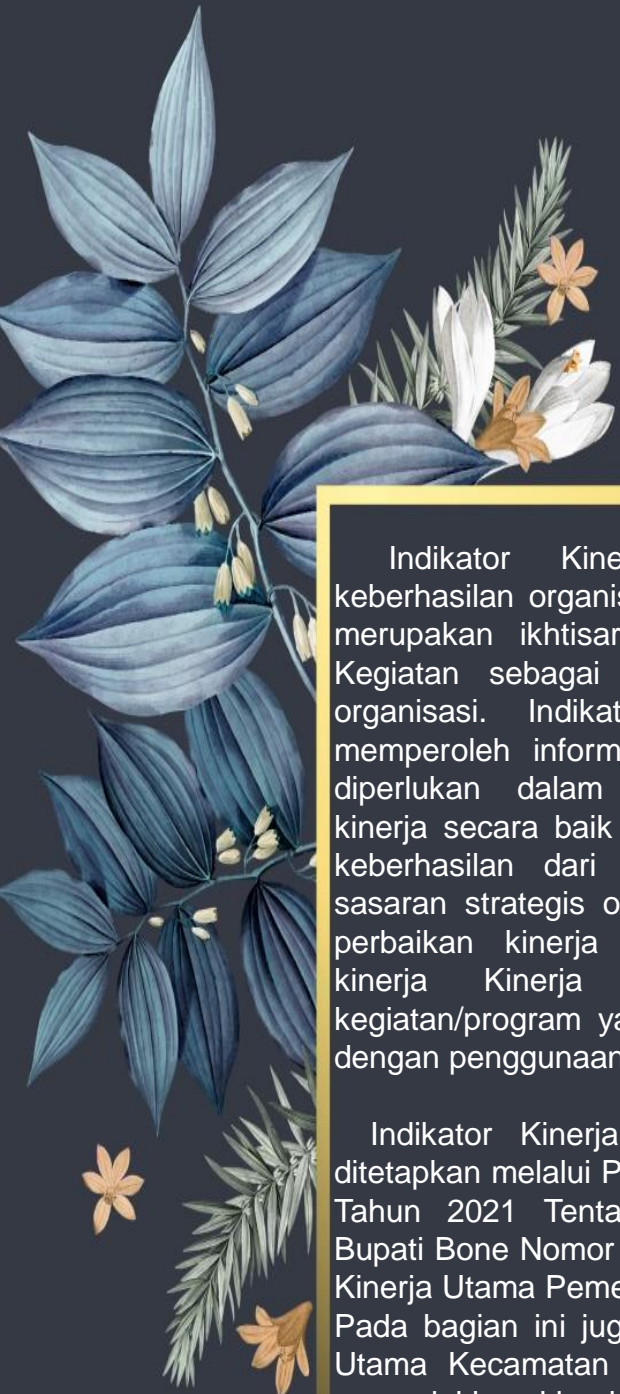
Selanjutnya diformulasikan dalam bentuk arah kebijakan perangkat daerah yang merupakan kerangka piker atau kerangka kerja untuk menyelesaikan Strategi dan Arah Kebijakan dapat ditunjukkan melalui table berikut :

Kecamatan SibuluE sebagai Satuan Organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dan perkembangan organisasinya dipengaruhi oleh lingkungan yang bersifat strategis. Secara terstruktur, lingkungan strategis dimaksud adalah berupa Lingkungan Internal organisasi yang terdiri atas dua faktor strategi yaitu kekuatan dan kelemahan serta Lingkungan Eksternal organisasi yang terdiri dari dua factor strategi yaitu tantangan dan peluang. Strategi mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi unit kerja yang berisi rencana secara menyeluruh dan terpadu tentang upaya-upaya organisasi dalam mencapai tujuan.

Tabel 2.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

VISI I : MASYARAKAT BONE YANG MANDIRI, BERDAYA SAING DAN SEJAHTERA			
MISI I :Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas KKN.			
TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan SibuluE	Hasil Evaluasi Sakip oleh Apip	Mengoptimalkan tugas dan fungsi melalui perbaikan manajemen Perangkat Daerah	Mengembangkan system operasional prosedur pelayanan dan tata laksana unsur penunjang pemerintahan umum.
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standard Pelayanan	Optimalisasi Pelayanan Kepada Masyarakat	


Sumber Data:
Dokumen Perubahan Rencana Strategis T.A 2018-2023 Kecamatan SibuluE



C. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar Hasil berbagai Program dan Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Indikator Kinerja Utama bertujuan memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik dan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran.

Indikator Kinerja Utama Kecamatan SibuluE ditetapkan melalui Peraturan Bupati Bone Nomor 101 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bone Nomor 87 Tahun 2018 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bone. Pada bagian ini juga dikemukakan indikator Kinerja Utama Kecamatan SibuluE yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD yang disajikan dalam tabel berikut ini:



Tabel 2.3. Indikator Kinerja Utama Kecamatan SibuluE

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Tahun Target				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Hasil Evaluasi Sakip oleh Apip	-	-	B	A	A
	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan	90	95	98	99	100

Sumber Data : Dokumen Perubahan Rencana Strategis T.A 2018-2023 Kecamatan SibuluE



INDIKATOR KINERJA UTAMA
KECAMATAN SIBULUE

NO	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan/Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
Kecamatan					
1.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Hasil Evaluasi SAKIP oleh APIP	Nilai Predikat SAKIP berdasarkan Hasil Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Daerah selaku APIP	Inspektorat Kabupaten Bone	Camat
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang Dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan	$\frac{\text{Jumlah Pelayanan Publik yang Dilayani/Ditindaklanjuti sesuai Standar}}{\text{Jumlah Pelayanan Publik yang Masuk}} \times 100\%$	Seksi Pemerintahan dan Kependudukan, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Seksi Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Seksi Perekonomian, Pendapatan Asli Daerah dan Kesejahteraan Rakyat, dan Seksi Pelayanan Umum	Camat

Sumber Data : Peraturan Bupati Bone Nomor 101 Tahun 2021

D. PERJANJIAN KINERJA



Perjanjian Kinerja Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone merupakan implementasi dari Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone Tahun 2018-2021 dan melaporkannya dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), di mana pada Tahun 2021 Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone menetapkan target-target kinerja sebagaimana target indikator kinerja sasaran dalam Rencana Strategis (Renstra) tersebut. Sesuai Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah hubungan penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas tugas, tanggung jawab, dan wewenang serta sumber daya yang akan dilaksanakan. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi oleh ruang lingkup kegiatan yang dihasilkan atas kegiatan tersebut, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya, yang disajikan dalam bentuk table berikut ini :

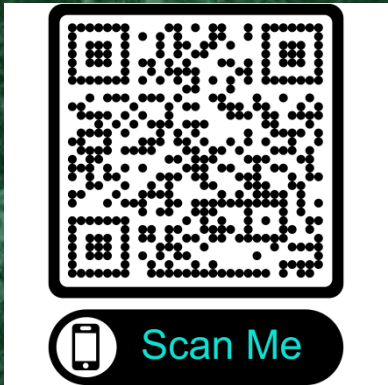


Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Kecamatan SibuluE Tahun 2022

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Hasil Evaluasi SAKIP oleh APIP	A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Rp.14.343.451.481
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang Dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan	99	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp.144.167.000
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp.27,000,000
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH	Rp.30.0000
J U M L A H				Rp.14.544.618.481

Sumber Data: Perjanjian Kinerja Camat SibuluE dan DPPA Anggaran 2022

Perjanjian Kinerja secara lengkap dapat diakses dengan memindai kode brikut ini :



E. STANDAR PENILAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mendukung visi dan misi Kabupaten Bone. Pengukuran tingkat capaian kinerja Kecamatan SibuluE Kabupaten Bone dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama.

Pelaporan disusun dengan melakukan pendekatan terhadap indikator kinerja baik secara kualitatif maupun kuantitatif yang diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat

pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Adapun pencapaian Kecamatan SibuluE Kabupaten Bone dari segi pengukuran kinerja yang dituangkan dalam Laporan Kinerja ini merupakan hasil kinerja Kecamatan SibuluE Kabupaten Bone. Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase capaian target indikator kinerja adalah:



$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \text{Realisasi/Target} \times 100\%$$

Tabel 2.5 Standar Penilaian Kinerja

Nilai %	Pencapaian
110 ke atas	Sangat tercapai/Sangat berhasil
$90 \leq x < 110$	Tercapai/Berhasil
$60 \leq x < 90$	Cukup tercapai/Cukup berhasil
$x < 60$	Tidak tercapai/Tidak berhasil

Tabel 2.6 Skor Perhitungan

Untuk indikator predikat SAKIP oleh APIP dalam mengukur persentase capaiannya dikonversi dalam bentuk angka yang disajikan didalam table berikut :

Keterangan	Skor
AA (Sangat Memuaskan)	7 (Tujuh)
A (Memuaskan)	6 (Enam)
BB (Sangat Baik)	5 (lima)
B (Baik)	4 (Empat)
CC (Cukup)	3 (Tiga)
C (Kurang)	2 (dua)
D (Sangat Kurang)	1 (Satu)

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
B. REALISASI ANGGARAN

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian kinerja Kecamatan SibuluE Kabupaten Bone sesuai dengan Pengukuran Kinerja disajikan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, dan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah (kalau ada dengan standar nasional). Sedangkan evaluasi capaian dan akuntabilitas kinerja meliputi analisis penyebab keberhasilan/kegagalan, analisis efisiensi penggunaan sumber daya, dan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan diuraikan guna memberikan gambaran efektifitas dan efisiensi pencapaian target kinerja. Pengukuran kinerja yang meliputi penetapan dan pengukuran indikator kinerja mencakup target / rencana masing-masing misi Kecamatan SibuluE dengan cara mencapainya melalui sasaran, indikator kinerja utama, kebijakan, program dan kegiatan serta disusun sesuai ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Untuk mengetahui tingkat prosentasi pencapaian masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Tahun 2021, perlu dilakukan pengukuran kinerja yang mencakup pengukuran pencapaian indikator sasaran. Kemudian dilakukan pengukuran kinerja dari masing-masing indikator yang Capaian indikator kinerja tujuan/sasaran atas perjanjian kinerja di atas mengacu pada tujuan/sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan SibuluE meliputi :



TUJUAN

**Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan
dengan indikator :**

Hasil Evaluasi Sakip oleh APIP

SASARAN

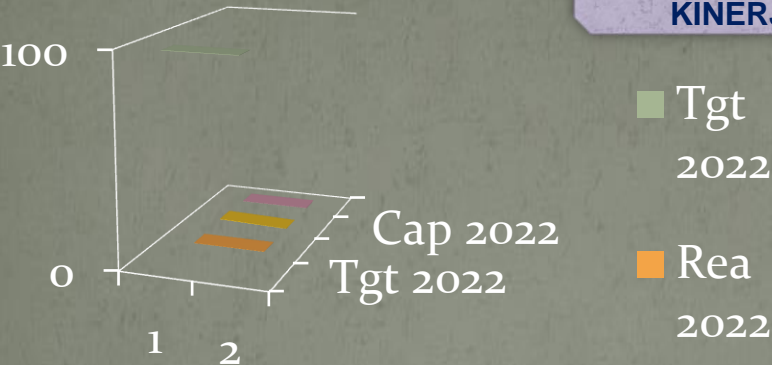
**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
dengan indikator :**

**Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang
Dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan**



Untuk setiap pernyataan kinerja tujuan/sasaran strategis tersebut di atas dilakukan analisis capaian kinerja Tahun 2022 sebagai berikut :

1. TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022



Capaian kinerja tahun anggaran 2022 merupakan hasil pengukuran capaian kinerja sasaran yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja dengan membandingkan target kinerja dan realisasinya pada tahun 2022 sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut :

Tabel 3.1 Target dan Realisasi Kinerja Tahun Anggaran 2022

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022	Keterangan
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Hasil Evaluasi Sakip Oleh APIP	A	A	*	Tercapai/Berhasil
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Presentase pelayanan Kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan	90	98,41	109,34%	Tercapai/Berhasil
Rata-rata				104.67%	Tercapai/Berhasil

Berdasarkan Tabel di atas, rata-rata capaian antara tujuan dan sasaran strategis kecamatan yang didukung oleh 2 indikator kinerja utama didapatkan predikat dengan nilai 104.67% untuk indicator pertama *Sangat Tercapai*, sedangkan untuk sasaran indicator kedua telah *Tercapai*.

Sumber Data: Data Pengukuran Kinerja Kecamatan SibuluE Tahun 2022

Untuk data pencapaian pengukuran kinerja Kecamatan SibuluE selengkapnya dapat dilihat dengan :

SCAN ME



2. REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018-2023

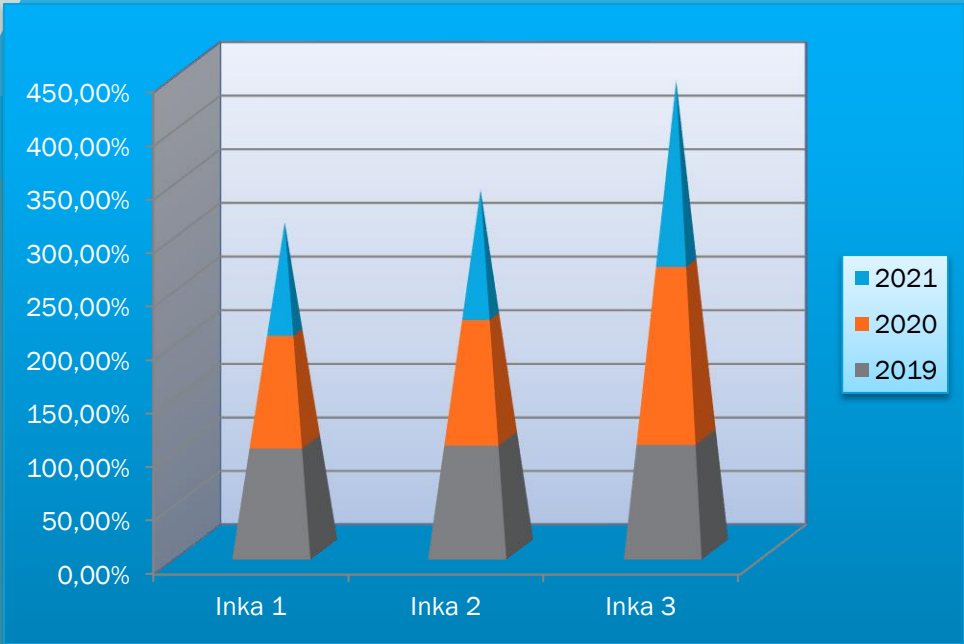
Tahun 2022 merupakan tahun kelima pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan SibuluE 2018 – 2023. Adapun realisasi dan capaian kinerja Kecamatan SibuluE apabila disandingkan dengan tahun sebelumnya, diperoleh matrik sebagai berikut :



Tabel 3.2 Realisasi Kinerja Tahun 2019-2021

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja 2021	Indikator Kinerja 2020	Capaian		
			2018	2019	2020
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Hasil Evaluasi Sakip Oleh APIP	Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan	100,5%	100,8%	102,1%
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Presentase pelayanan Kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan	Persentase Pengaduan pelayanan publik dari masyarakat yang dapat ditindaklanjuti/ditangani	102,6%	103,7%	114,1%
		Persentase Usulan Kegiatan pembangunan oleh masyarakat hasil musrenbang Kelurahan / Desa dapat dilaksanakan ditingkat Kelurahan/ Desa	102,5%	105%	162,7%

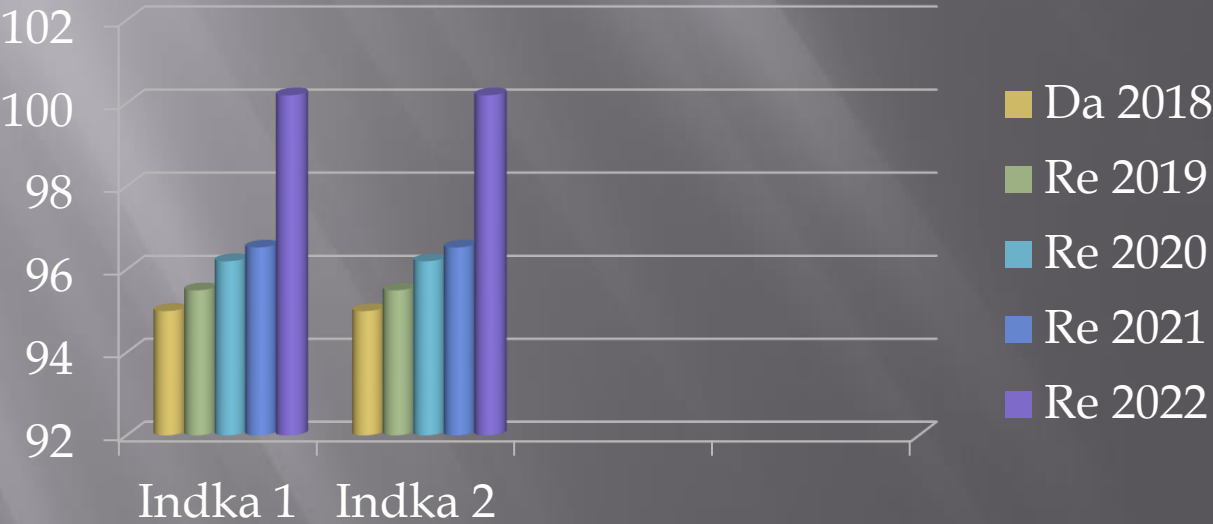
Sumber Data: Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 Kecamatan SibuluE



Tabel 3.3 Realisasi Kinerja Tahun 2019-2023

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Data Awal 2018	Realisasi Kinerja					Capaian Kinerja				
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Hasil Evaluasi Sakip Oleh APIP	B	B	B	B	A		-	-	100%	100%	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Presentase pelayanan Kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan	95	95,50	96,20	96,53	98,41		95,50	96,20	96,53	98,41	
Rata-rata		95	95,50	96,20	96,53	98,41		95,50	96,20	96,53	98,41	

Sumber Data: Dokumen Perubahan Rencana Strategis T.A 2018-2023 Kecamatan SibuluE



Berdasarkan Tabel 3.3 dan 3.2 di atas dapat dijelaskan bahwa hanya 1 indikator kinerja utama kecamatan SibuluE yang dapat disandingkan persentase capaian kinerjanya dengan Tahun sebelumnya yaitu indikator Presentase pelayanan Kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan. Indikator ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

Sedangkan untuk indikator predikat Hasil SAKIP oleh APIP persentase capaian kinerjanya juga dapat disandingkan dengan tahun sebelumnya, realisasi kinerja pada indikator ini selama kurun waktu 3 (tiga) tahun yaitu Tahun 2020, 2021 dan 2022 mengalami peningkatan (*dinamis*) dengan Predikat A.

3. REALISASI KINERJA YANG MENGACU PADA TARGET JANGKA MENENGAH RENSTRA

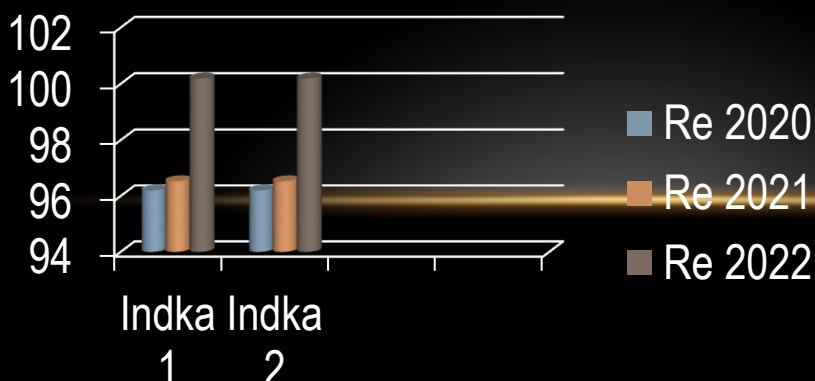


Analisa berikutnya dalam mengukur capaian kinerja tujuan/sasaran adalah dengan membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah sebagaimana tercantum pada Rencana Strategis Kecamatan SibuluE Tahun 2018 – 2023 seperti dalam table berikut :

Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan target Jangka Menengah Renstra 2018 -2023

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah	Realisasi Kinerja					Capaian Kinerja 2022
			2019	2020	2021	2022	2023	
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Hasil Evaluasi Sakip oleh Apip	A	B	B	B	A	-	*
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan	95	95,50	96,20	96,53	98,41	-	109,34%

Sumber Data: Dokumen Perubahan Rencana Strategis Perubahan T.A 2018-2023 Kecamatan SibuluE * Data Taksiran



Berdasarkan Tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa untuk Indikator kinerja utama yang pertama Hasil Evaluasi Sakip oleh Apip telah mencapai jangka menengah, sedangkan untuk indikator kedua Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan telah mencapai target jangka menengah dan capaian kinerja Tahun 2022 **Tercapai**.

4. REALISASI KINERJA DAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL/STANDAR NASIONAL LAINNYA

Analisa berikutnya dalam mengukur capaian kinerja tujuan/sasaran strategis adalah dengan membandingkan realisasi kinerja indikator tujuan/sasaran strategis Kecamatan SibuluE dengan target dan realisasi standar pelayanan minimal/standar nasional sebagaimana tabel berikut :

Tabel. 3.5 Realisasi Kinerja dan Standar Pelayanan Minimal/Standar Nasional Lainnya

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja 2022	Standar Nasional	
			Target 2022	Realisasi 2022
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Hasil Evaluasi Sakip oleh Apip	A	–	–
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan	100	–	–

Sumber Data: Dokumen Perubahan Rencana Strategis T.A 2018–2023 Kecamatan SibuluE



Berdasarkan Tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa capaian indikator tujuan/sasaran strategis Kecamatan SibuluE tidak dapat disandingkan dengan standard nasional karena tidak melaksanakan Standar Pelayanan Minimal/standar nasional lainnya.

5. ANALISA PENYEBAB
KEBERHASILAN/KEGAGALAN

Untuk menganalisa keberhasilan atau kegagalan indikator kinerja dalam rangka pencapaian tujuan/sasaran strategis kita lihat tabel ikhtisar pencapaian capaian kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.6 Analisa Penyebab Keberhasilan / Kegagalan

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian	Rata-rata Capaian	Predikat			
				>110	90=<s/d<110	60=<s/d<90	<60
				Sangat Berhasil	Berhasil	Cukup Berhasil	Tidak Berhasil
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan			100%		√		
	Hasil Evaluasi Sakip oleh Apip	100%			√		
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik			109,34 %	√			
	Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan	109,34%		√			
Rata-Rata			104,67%	√	√		

Sumber Data : Data Pengukuran Kinerja Tahun 2022 Kecamatan SibuluE

Berdasarkan data pada table 3.6, dapat disimpulkan bahwa rata-rata realisasi capaian indikator tujuan/sasaran strategis Kecamatan SibuluE tahun 2022 dalam kategori **Berhasil**.



Analisa penyebab keberhasilan dan kegagalan capaian indikator kinerja sasaran strategis dijelaskan sebagai berikut :

TUJUAN

Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan SibuluE dengan indikator : Hasil Evaluasi Sakip Oleh APIP

Hasil evaluasi oleh Apip adalah penilaian tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintah yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*). Pemanfaatan hasil evaluasi atas implementasi SAKIP Perangkat Daerah tergantung pada pengguna hasil evaluasi/kebijakan pimpinan/unit kerja dengan mempertimbangkan berbagai kendala yang ada di masing-masing perangkat daerah secara berkelanjutan

Indikator ini diporeleh capaian kinerja 100 %, hal ini didukung oleh :

- Perencanaan strategis telah dilakukan perubahan melalui perubahan Renstra 2021-2023 untuk menyelaraskan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Bone dengan Indikator Kinerja Utama Kecamatan SibuluE.
- Telah dilakukan pengukuran kinerja secara berkala (per Triwulan).
- Capaian Indikator kinerja Utama Kecamatan SibuluE Tahun 2022 diperoleh rata – rata dengan Nilai 104,67 % (Sangat Berhasil)
- Laporan Kinerja Kecamatan SibuluE menyajikan data yang informatid dan analisis yang memadai
- Dilakukan evaluasi kinerja per Triwulan yang dipimpin oleh Camat SibuluE.

Meskipun capaian kinerja mencapai 100 % terdapat beberapa kendala dalam pencapaiannya yaitu belum terdapatnya cascading kinerja pelaksana. Upaya yang telah dilakukan oleh Kecamatan SibuluE untuk meningkatkan predikat SAKIP oleh APIP pada Tahun 2022 melakukan koordinasi dengan Bagian Organisasi Kabupaten Bone dan membuat Cascading Kinerja Jabatan Pelaksana.

SASARAN

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan indikator : Presentase pelayanan Kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan

Presentase pelayanan Kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan adalah jumlah pelayanan public yang dilayani/ditindak lanjuti sesuai standar dibagi jumlah pelayanan public yang masuk kali 100%. Jenis pelayanan public pada Kantor Kecamatan wilayah Kabupaten Bone :

- Pelayanan Permohonan Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
- Pelayanan Pengurusan Kartu Keluarga
- Pelayanan Pengurusan Kartu Tanda Penduduk Elektronik
- Pelayanan Pengurusan Kartu Identitas Anak
- Pelayanan Pengurusan Mutasi Penduduk
- Pelayanan Pengurusan Akta Kelahiran dan Kematian
- Pelayanan Akta Tanah / Jual Beli
- Pelayanan Surat Keterangan Ahli Waris
- Pelayanan Dispensasi Nikah
- Pelayanan Pernyataan Rekomendasi/Izin
- Pelayanan Pengurusan Mutasi Pajak
- Pelayanan Pengurusan Surat Keterangan

Indikator ini diporeleh capaian kinerja **109,34%** hal ini didukung oleh :

Telah tersusunnya Peta Proses Bisnis Kecamatan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis

Terdapat SOP pada setiap jenis layanan Adanya tunjangan Kinerja Pegawai yang menjadi motivasi kerja pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Telah dilakukan Bimtek Pelayanan Prima kepada beberapa ASN di Kecamatan.

Pengawasan dan evaluasi secara berkala oleh atasan langsung

Dalam pencapaian indikator ini meskipun **109,34 %** diperoleh beberapa hambatan, antara lain :

- a. Masih kurangnya pemahaman masyarakat yang tidak mengetahui standar pelayanan.
- b. Masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan publik (Alat perekaman e-KTP)

Adapun solusi yang dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut, antara lain :

- a. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang standar pelayanan masyarakat
- b. Melakukan pemeliharaan alat perekaman e-KTP



Sumber daya adalah nilai potensi yang dimiliki Kecamatan SibuluE dalam mencapai tujuan/sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra. Sumber daya yang dimiliki Kecamatan SibuluE adalah sumber daya manusia, sarana prasarana kantor dan anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan anggaran Tahun 2022 untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi.

Efisiensi adalah ukuran tingkat penggunaan sumber daya dalam suatu proses. Semakin hemat/sedikit penggunaan sumber daya, maka prosesnya dikatakan semakin efisien. Berikut tabel untuk menganalisis efisiensi sumber daya Kecamatan SibuluE dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan :

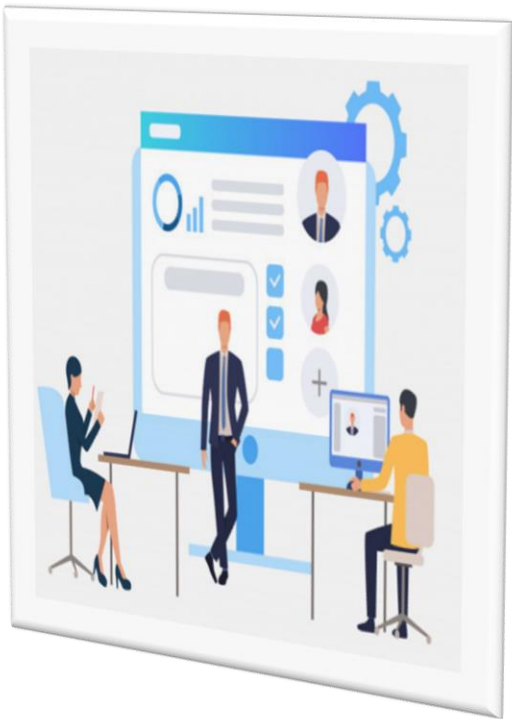
Tabel 3.7 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisiensi Sumber Daya %
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)	
A	B	C	D	e (d/c x100%)	f	g	h (g/f x 100%)	i (e-h)
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Hasil Evaluasi Sakip oleh Apip	A	A	100 *	14.343.451.481	14.370.341.779	100	-
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan	90	98,41	109,34	201.167.000	201.167.00	100	9,34

Sumber Data : SPJ Fungsional (C3) Tahun 2022 Kecamatan SibuluE

Berdasarkan hasil analisis efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) yaitu perbandingan antara kinerja dengan anggaran, maka dapat dilihat bahwa pada pelaksanaan kegiatan Kecamatan SibuluE terdapat efisiensi anggaran dan efektivitas penggunaan dana berdasarkan kinerja yaitu:

- a. Indikator Hasil Evaluasi SAKIP oleh APiP dengan capaian kinerja 100 % dan persentase capaian realisasi anggaran 100 %, menunjukkan bahwa tidak ada efisiensi.
- b. Indikator Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan dengan capaian kinerja 104,67 % dan persentase capaian realisasi anggaran 99,39 %, menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 9,34 %.



7. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN YANG MENUNJANG
KEBERHASILANA/KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA

Analisis terhadap program/kegiatan/Sub Kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan SibuluE sebagai berikut :

Tabel 3.7 Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan /Kegagalan Pencapaian Kinerja

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Rencana Tindak Lanjut
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Hasil Evaluasi Sakip oleh Apip	Nilai A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Cakupan Realisasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (%)	100	100,19	100,19	Perlu adanya Peningkatan Kinerja dalam Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran dan evaluasi Kecamatan (Dokumen)	3	100.00	100.00	Perlu adanya Ketetapan Waktu dalam Hal Penyusunan Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Kecamatan	3	100.00	100.00	Perlu adanya Ketersediaan Satuan Standar Harga Sebelum Menyusun Perencanaan Perangkat Daerah
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Terealisasi	12	100.22	100.22	Perlu diadakan kesesuaian pagu anggaran mengikuti anggaran perubahan daerah
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	12	100,22	100,22	Perlu diadakan kesesuaian pagu anggaran supaya tidak terjadi pengembalian
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Keuanga Perangkat Daerah	23	100.00	100.00	Perlu diadakan kelengkapan pagu anggaran mengikuti anggaran perubahan daerah
			Penyedia Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Realisasi administrasi kepegawaian Perangkat	23	100.00	100.00	Perlu diadakan kesesuaian pagu anggaran supaya tidak terjadi

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	100.00	100.00	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket penyediaan alat Tulis kantor (ATK) penunjang administrasi perkantoran sesuai rencana kebutuhan	12	100.00	100.00	Diperlukan peralatan dan perlengkapan yang memadai sesuai dengan kebutuhan kantor
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12	100.00	100.00	perlu penyempurnaan Standar harga yang signifikan pada aplikasi
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Ketersediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	24	100.00	100.00	penggadnaan dokumen seharusnya terpusat pada satu sub kegiatan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	24	100.00	100.00	Perlu diadakan minat baca pada pegawai asn
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	517	100.00	100.00	perlu diadakan pembagian sppd pada semua kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Realisasi Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5	100.00	100.00	Perlu diadakan pengusulan Barang yang sesuai dengan kebutuhan

			Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel (Paket)	5	100.00	100.00	Penambahan Mebel untuk Operasional Pelayanan kepada masyarakat
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	12	99.85	99.85	Diperlukan adanya kerja sama antar Tim dalam hal penyelesaian Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	12	100	100	Diperlukan stekholder dan pihak yang berkompeten dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan Desa
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	100.00	100.00	Perlu adanya Kordinasi dan Sinergitas antar Pokja Desa dan FKKS dalam Hal Penyusunan Laporan
			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Cakupan Realisasi Pemberdayaan di Kelurahan (%)	12	99.80	99.80	Diperlukan optimalisasi terhadap kegiatan pemberdayaan Kelurahan
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Terbangun di Kelurahan	12	100.00	100.00	Mengkordinasikan kepada Pemerintah Kabupaten terhadap Kewenangan Kelurahan dalam Pengelolaan anggaran Pembangunan Sarana Prasarana kelurahan
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Pelaksanaan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	3	100.00	100.00	Diperlukan optimalisasi terhadap stakeholder dan pihak terkait dalam hal kordinasi ketentraman dan ketertiban umum
			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3	100.00	100.00	meningkatkan Kordinasi dengan stakeholder terkait
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Orang)	3	100.00	100.00	Perlu Diadakan Rapat Kordinasi Lintas Sektor Secara Rutin dan Berkala

			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA	Cakupan Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan pemerintah desa	19	100.00	100.00	Diperlukan Stakeholder dalam hal pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pegawasan Pemerintah Desa	Jumlah Realisasi Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	19	100.00	100.00	Diperlukan partisipasi aktif bagi Kepala Desa dalam hal Pembinaan dan Pengawasan Desa
			Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDes	19	100.00	100.00	Perlu diadakan Bimbingan Teknis kepada para kepala desa dalam hal penyusunan Peraturan Kepala Desa
JUM	12	100.18	100					

Berdasarkan tabel diatas tentang analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegiatan pencapaian kinerja, disampaikan hal sebagai berikut :

TUJUAN

Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan SibuluE dengan indikator : Hasil Evaluasi Sakip Oleh APIP

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Upaya Perbaikan :

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pencapaian pada indicator ini yaitu Pada proses perencanaan nilai TPP perlu di sinkronkan dgn keadaan riil ASN

SASARAN

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan indikator : Presentase pelayanan Kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

- a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- b. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
- b. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- c. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Mebel
- d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

2. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

- a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
- b. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

3. PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

- Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

Upaya perbaikan

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pencapaian pada indicator ini yaitu :

- Pada proses perencanaan nilai TPP perlu di sinkronkan dgn keadaan riil ASN
- Pada proses pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan perlu di Sinkronkan
- Anggaran Pengawasan dan Pengendalian Internal yang Perlu di Tingkatkan

4. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

a. Fasilitasi, Rekomendasi Dan Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- Koordinasi Pendampingan Desa Di Wilayahnya

Upaya perbaikan

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pencapaian pada indicator ini yaitu :

- Pada proses perencanaan ini diperlukan partisipasi aktif bagi Kepala Desa dalam hal Pembinaan dan Pengawasan Desa

B. REALISASI ANGGARAN

Pagu anggaran belanja Kecamatan SibuluE Kabupaten Bone Tahun 2022 setelah perubahan sebesar Rp. 14.544.618.481,00 (Empat Belas Milyar Lima Ratus Juta Empat Puluh Empat Juta Enam Ratus Delapan Belas Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah) sebagaimana tabel sebagai berikut :

Tabel 7.1 Realisasi Anggaran

Uraian	Jumlah (Rp)		%
	Anggaran	Realisasi	
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan			
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik			
Program:			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Rp.14.343.451.481,00	Rp.14.370.341.779,00	100,18
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp.144.167.000,00	Rp.144.167.000,00	100,00
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp.27.000,000	Rp.27.000,000	100,00
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp.30.000.000,00	Rp.30.000.000,00	100,00
TOTAL	Rp .4.544.618.481,00	Rp 14.571.508.779,00	100,18

Sumber Data : SPJ Fungsional (C3) Tahun 2022
Kecamatan SibuluE





BAB IV PENUTUP

A. SIMPULAN UMUM

B. KENDALA PELAKSANAAN

C. DAN UPAYA PENANGANAN

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

← SUCCESS
FAILURE →

SIMPULAN UMUM

KENDALA PELAKSANAAN DAN UPAYA MENGATASI

Kendala Pelaksanaan

- Masih kurangnya pemahaman masyarakat yang tidak mengetahui standar pelayanan.
- Masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan publik (Alat perekaman e-KTP)

.Indikator kinerja utama Kecamatan SibuluE dengan tujuan meningkatkan akuntabilitas kinerja Kecamatan dan sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik pada tahun anggaran 2022 diperoleh rata-rata capaian kinerja sebesar **104,67 %** atau kategori *Berhasil*.

UPAYA DALAM MENGATASI

Adapun solusi yang dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut, antara lain :

- Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang standar pelayanan masyarakat
- Melakukan koordinasi pengadaan dan pemeliharaan alat perekaman e-KTP



LAMPIRAN

The complete attachment can be
accessed by scanning the following
code :

